

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## SEKRETARIAT JENDERAL

---

### MEMORANDUM NOMOR 261/SJ.4/TU.210/I/2025

Yth. : Kepala Biro Hukum  
Dari : Ketua Tim Kerja Perundang-Undangan II  
Hal : Laporan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi  
Lampiran : -  
Tanggal : 20 Januari 2025

---

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, melalui konferensi video berdasarkan undangan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, Kementerian Hukum, Nomor PPE.4.PP.03.03-20, tanggal 14 Januari 2025, hal Undangan Rapat Pengharmonisasian dan berdasarkan undangan Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, KKP, Nomor B.120/DJPKRL.5/TU.330/I/2025, tanggal 15 Januari 2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi, bersama ini dengan hormat kami laporkan beberapa hal berikut:

1. rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Kementerian Hukum, serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Hukum, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal PKRL serta Biro Hukum);
2. rapat diselenggarakan dalam rangka rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan menindaklanjuti hasil rapat harmonisasi pada tanggal 7 Januari 2025;
3. beberapa hal yang berkembang dalam rapat antara lain:
  - a. penyempurnaan materi muatan terkait salah satu pertimbangan dalam penerbitan perizinan pemanfaatan di kawasan konservasi yaitu keadaan kahar yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat/pemerintah daerah/instansi yang berwenang atau yang ditentukan oleh pengelola kawasan (Pasal (2) ayat (4));
  - b. definisi atau batasan pengertian masyarakat dihapus dan dielaborasi pada batang tubuh sebagai salah satu pihak yang melakukan kegiatan di kawasan konservasi yaitu kelompok masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 13 ayat (1) huruf e);
  - c. penyempurnaan materi muatan terkait kewajiban mengajukan perizinan pemanfaatan di kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut kepada setiap orang yang telah melaksanakan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum memiliki perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi

dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku (Pasal 26 ayat (1) huruf b);

- d. penambahan materi muatan terkait pelanggaran kewajiban mengajukan perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut terhadap setiap orang yang telah melaksanakan pemanfaatan di kawasan konservasi sebelum Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku dan belum memiliki perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan (Pasal 26 ayat (2));
  - e. Kementerian Hukum menyatakan bahwa rapat harmonisasi telah dinyatakan selesai dan akan menyampaikan surat selesai harmonisasi kepada pemrakarsa.
4. dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat harmonisasi tersebut Kementerian Hukum akan menyempurnakan R.Permen KP sesuai dengan hasil rapat harmonisasi sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut.

Atas perkenan dan arahan Ibu lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Moh. Hosni Mubarak**

# DOKUMENTASI RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI

(7 Januari 2025)

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a document titled "RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN.... TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,". The document content includes a list of items to be considered (Menimbang) regarding the need for a new regulation to replace existing ones that are no longer suitable for development needs and community interests. The list includes items a, b, and c, with item b mentioning specific articles of existing regulations (Pasal 31-ayat (5), Pasal 32-ayat (5), Pasal 33-ayat (5), and Pasal 34-ayat (5)) and item c mentioning the need to establish a regulation regarding the use of conservation areas. The meeting participants list on the right shows 16 participants, including Yessysca Sari Debby-KKP (Me), DJPP Ester (Host), Shinto\_DJPP (Co-host), Lina DJPP, Arief Nugroho R, KKP, BagusHariadi\_Keminvest/bKPM, Dit. KEKP \_Setiono, Dit. KEKP\_Dedy E.S, Dit. KEKP\_Julham, Fajar R, KKP - Herbin PUTRA, KKP, Biro Hukum, Hosni, and O, Krisna\_KKP. The bottom status bar shows the temperature as 28°C and the weather as "Hujan ringan" (light rain).

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a document titled "RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN.... TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,". The document content includes a list of items to be considered (Menimbang) regarding the need for a new regulation to replace existing ones that are no longer suitable for development needs and community interests. The list includes items a, b, and c, with item b mentioning specific articles of existing regulations (Pasal 31-ayat (5), Pasal 32-ayat (5), Pasal 33-ayat (5), and Pasal 34-ayat (5)) and item c mentioning the need to establish a regulation regarding the use of conservation areas. The meeting participants list on the right shows 18 participants, including Yessysca Sari Debby-KKP (Me), DJPP Ester (Host), Shinto\_DJPP (Co-host), Lina DJPP, Arief Nugroho R, KKP, BagusHariadi\_Keminvest/bKPM, Dit. KEKP \_Setiono, Dit. KEKP\_Dedy E.S, Dit. KEKP\_Julham, Fajar R, KKP - Herbin PUTRA, KKP, Biro Hukum, Hosni, and O, Krisna\_KKP. The bottom status bar shows the temperature as 28°C and the weather as "Hujan ringan" (light rain).